



## **Peranan Perbankan Dalam Implementasi dan Informasi Pemberian Kredit Usaha Rakyat**

### **The Role of Banking in Implementation and Information Provision of People's Business Credit**

**Ahmad Nur Budi Utama<sup>1</sup>, Ade Irma Suryani<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jambi

#### **Abstrak**

Salah satu cara untuk mengukur kemajuan ekonomi suatu Negara adalah dengan melihat bidang usaha rakyat. Bidang tersebut yang merujuk pada sektor ekonomi yang mencakup berbagai jenis bisnis yang dijalankan oleh pengusaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang bekerja secara mandiri atau dalam kelompok. Untuk membantu usaha kecil yang menghadapi masalah permodalan, pemerintah mendorong perbankan dalam memberikan modal usaha dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, dan menciptakan lapangan kerja. Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu program yang dikeluarkan pemerintah untuk membantu masyarakat kecil yang bermasalah dengan permodalan. Bagaimana kredit usaha rakyat membantu UMKM? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data sekunder. BNI KUR menyediakan plafon kredit yang memungkinkan masyarakat memanfaatkannya saat mereka merencanakan dan mengembangkan bisnis mereka. Penelitian ini juga membahas bagaimana BNI KUR berperan bagi usaha mikro dan kecil yang ingin mengembangkan bisnis mereka dengan menyediakan kredit modal kerja dan kredit investasi.

**Kata Kunci:** Usaha Rakyat; Peran Perbankan; Kredit Rakyat; Kredit Usaha; Modal Usaha

#### **Abstract**

*One way to measure the economic progress of a country is to look at the people's business fields. The field refers to the economic sector which includes various types of businesses run by micro, small and medium entrepreneurs (MSMEs) who work independently or in groups. To help small businesses facing capital problems, the government encourages banks to provide business capital with the aim of accelerating economic growth, increasing competitiveness, and creating jobs. The People's Business Credit is one of the programs issued by the government to help small communities who have problems with capital. How does people's business credit help MSMEs? This study used a qualitative approach with secondary data. BNI KUR provides a credit ceiling that allows people to take advantage of it when they plan and develop their business. This research also discusses how BNI KUR plays a role for micro and small businesses that want to develop their business by providing working capital loans and investment loans.*

**Keywords:** People's Business; The Role of Banking; People's Credit; Business Loan; Business Capital

## **PENDAHULUAN**

Bidang usaha rakyat menjadi topik yang banyak mendapat perhatian di berbagai forum ekonomi nasional maupun internasional. Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius yang menghambat proses pembangunan di Indonesia (Murwadji et al., 2020). Kemajuan ekonomi khususnya bidang usaha rakyat merupakan salah satu tolak ukur kemajuan dari suatu Negara. Bidang usaha rakyat merujuk pada sektor ekonomi yang melibatkan banyak aktivitas usaha yang dilakukan oleh masyarakat kecil atau pengusaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang beroperasi secara mandiri atau kelompok. Bidang usaha ini meliputi berbagai sektor seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, industri kecil dan lain-lain. Sektor UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia karena ikut membantu menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal. Salah satu hambatan yang dihadapi UMKM tak lain berkenaan dengan permasalahan permodalan (Aristanto, 2019), oleh karena itu pemerintah terus mendorong pengembangan bidang usaha rakyat melalui program-program seperti pemberian modal usaha, pelatihan kewirausahaan, penyediaan akses ke pasar dan sumber daya lainnya.

Pemberian modal usaha oleh pemerintah merupakan bantuan atau dukungan finansial yang diberikan kepada pelaku usaha untuk membantu mereka dalam memulai usaha, mengembangkan, atau memperkuat usaha mereka (Lestari & JUNIARIANI, 2022). Modal kerja mempengaruhi pendapatan pelaku UMKM (Wilandari, 2020). Pemberian modal usaha ini biasanya diberikan dalam bentuk pinjaman atau subsidi modal (Abai & Awang, 2021). Tujuan pemberian modal usaha oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing usaha, serta membantu mendorong kemajuan sektor usaha di negara tersebut. Pemerintah juga mendorong perbankan untuk memberikan modal usaha dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, dan menciptakan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan memberikan insentif bagi perbankan yang memberikan kredit pada sektor usaha yang produktif dan berdampak positif bagi ekonomi. Pemerintah juga meningkatkan peran Lembaga Penjaminan Kredit (LPK) yang dapat menjamin kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UKMM) agar lebih mudah untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan. Kemudian Pemerintah Mengeluarkan kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung ekspansi kredit, seperti penurunan suku bunga dan stimulus fiskal yang juga bertujuan untuk meredam inflasi (Utama & Mustika, 2022). Dengan adanya dorongan dari pemerintah ini, diharapkan perbankan dapat lebih berpartisipasi dalam memberikan modal usaha bagi pelaku usaha sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih kompleks (Martokoesoemo et al., 2020).

Pasca pandemic covid-19 menurut Saadat et al (Saadat et al., 2020) telah mengubah hidup masyarakat dan menyebabkan kehilangan pekerjaan secara luas serta banyaknya bisnis yang ditutup tentunya membuat partisipasi usaha disektor keuangan saat ini berperan penting dalam mendukung pertumbuhan



ekonomi. Sektor Perbankan merupakan salah satu jenis sektor yang memiliki dampak signifikan terhadap kelangsungan perekonomian jangka panjang. Menurut Hutauruk (2020) bank merupakan lembaga keuangan sebagai penggerak ekonomi nasional yang berfungsi untuk menerima simpanan uang. Bank menerima simpanan uang dari masyarakat dan menawarkan produk simpanan seperti tabungan, deposito, giro, dan lain-lain (Ramaswamy et al., 2021). Bank memfasilitasi transaksi keuangan antara nasabah dan pihak lain, bank menyediakan layanan transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian saham, dan transaksi lainnya. Kemudian pada era digital saat ini bank menyediakan layanan jasa seperti kartu kredit, kartu debit, asuransi, serta layanan investasi dan perencanaan keuangan (Rastogi et al., 2020). Sebagai pengelola uang nasabah, Bank memastikan keamanan dan pertumbuhan uang nasabah melalui berbagai produk investasi dan bank juga berhati-hati dalam pemberian kredit (Dharmajaya, 2018). Kemudian Bank memberikan jasa konsultasi keuangan kepada nasabah dalam hal investasi, perencanaan keuangan, dan pengurusan keuangan yang lebih baik.

Lembaga perbankan sangat berperan dalam pertumbuhan usaha kecil dan menengah di banyak negara maju dan telah dianggap sebagai salah satu pendorong pembangunan ekonomi (Engwa et al., 2021). Perbankan merupakan suatu organisasi yang menaikkan taraf hidup masyarakat umum dengan memberikan uang kepada masyarakat umum melalui kredit atau cara lain setelah mengumpulkan uang dari masyarakat umum melalui tabungan. Sasaran disini diarahkan pada bidang-bidang yang bermanfaat yang dapat memberikan pengaruh ganda, baik dalam bidang pekerjaan, perluasan lapangan usaha rakyat, maupun perluasan perdagangan luar negeri. Kondisi keuangan yang tidak stabil merupakan sumber perhatian para pembuat kebijakan dan regulator bank (Antony et al., 2021). Perbankan dalam penyaluran aset harus tetap fokus pada faktor pengembangan. Selain itu, perbankan memfasilitasi transaksi perdagangan domestik dan internasional secara signifikan dan aktif. Perbankan mengantisipasi bahwa penyaluran kredit akan menghasilkan pendapatan karena termasuk dalam kategori aset produktif atau memiliki tingkat akseptasi yang tinggi. Dari sisi para pelaku UMKM, mereka sangat mengharapkan bantuan secara finansial dan juga pelatihan secara teknis (Cahaya et al., 2021).

Kredit adalah salah satu cara yang paling umum untuk membiayai kegiatan ekonomi. Efektifitas kredit UMKM memiliki nilai yang baik dengan peningkatan setiap tahunnya dan memiliki outcome bagi masyarakat yang menerima KUR (Malelak et al., 2020). Kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari suatu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak. Kredit merupakan tagihan yang diberikan sebagai akibat adanya pinjaman atau perjanjian antara Bank dengan pihak lain yang menyatakan bahwa peminjam harus melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu. Kewajiban ini dapat berupa pokok, kompensasi, atau bagi hasil. Bank melakukan kegiatan penting yang berkaitan dengan tata Kelola kebijakan perkreditan dengan Pendidikan sumber dana yang diperlukan

untuk semua jenis usaha (Aristanto et al., 2020). Kredit yang diberikan kepada debitur juga merupakan keuntungan bagi Bank, karena pelayanan perkreditan itu sendiri menghasilkan pendapatan bagi bank (Chandrayanti, 2022).

Kepercayaan pemerintah dan masyarakat pada perbankan untuk memberikan kredit juga mempertimbangkan sisi resiko terutama gagal bayar (Ponsam et al., 2021). Citra positif sangat perlu diimplementasikan perbankan dalam menjaga kesan di masyarakat, meskipun masih juga terdapat ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan (Nam et al., 2019). Bank terus memberikan kemudahan akses ke layanan perbankan sehingga masyarakat dapat mengelola keuangannya dengan lebih efisien dan efektif. Selain itu, bank juga memberikan berbagai produk dan layanan yang menawarkan manfaat dan keuntungan finansial bagi nasabah (Jamid et al., 2022). Bank memberikan pinjaman dan kredit kepada pelaku usaha dan individu yang membutuhkan, sehingga membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Widayanti et al., 2022). Bank juga dapat memberikan edukasi keuangan dan program pengembangan usaha kepada masyarakat untuk membantu mereka meningkatkan keterampilan keuangan dan memaksimalkan potensi finansial mereka. Perbankan memiliki pengendalian internal untuk mencermati bidang-bidang yang diperlukan dalam pemberian kredit usaha rakyat (Cahyani & Iswanaji, 2021).

Perilaku wirausaha dan modal usaha untuk menunjang unsur keberhasilan usaha (Nam Hee et al., 2020). Modal usaha masih menjadi salah satu masalah utama dalam sebuah bisnis, semakin besar modal usaha, maka semakin besar peluang usaha yang berdampak pada perkembangan usaha (Suparwo et al., 2018). Pertumbuhan kredit usaha perorangan merupakan salah satu hal menarik yang perlu didiskusikan, disempurnakan, dan diperbaiki agar pengelolaan kredit menjadi lebih efisien dan mengoptimalkan sisi perbankan dalam pengembangan dan peningkatan perbankan. Kredit yang ditawarkan bank kepada usaha perorangan merupakan salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dalam membantu program pemerintah terhadap pendapatan UMKM (Wilandari, 2020). Kondisi saat ini terlihat dari masih banyaknya UMKM yang tumbuh tetapi kurang modal usaha dalam operasionalnya (Suginam et al., 2021).

Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu program yang dikeluarkan pemerintah untuk membantu masyarakat kecil yang bermasalah dengan permodalan (Ramadayanti & Kosasih, 2021). KUR pada perbankan merupakan proses akses terhadap produk dan layanan keuangan yang tepat untuk semua masyarakat termasuk golongan lemah dan berpenghasilan rendah dengan biaya yang terjangkau (Vincent & Sivakumar, 2019). Lembaga perbankan yang dikenal dengan nama Bank Negara Indonesia (BNI) merupakan salah perbankan yang mendukung program pemerintah terhadap UMKM yang diharapkan mampu meningkatkan pengelolaan dana yang bermanfaat bagi masyarakat. PT. BNI Persero Tbk dalam mendukung UMKM memiliki fasilitas kredit dengan nama BNI kredit usaha rakyat (KUR). BNI KUR menawarkan pinjaman usaha yang diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil. KUR BNI menawarkan pinjaman dengan jumlah hingga Rp 500 juta



dan suku bunga yang kompetitif. BNI KUR menawarkan pinjaman modal kerja dan investasi kepada UMKM, koperasi, dan usaha lain yang produktif serta layak kepada penerima kredit. BNI KUR tentunya melakukan investigasi internal dan eksternal secara menyeluruh terhadap debitur dan kreditur untuk menghindari masalah di kemudian hari. Standar kualitas kredit harus dimasukkan dalam kebijakan umum untuk mengurangi risiko kredit dan mempermudah analisis permintaan kredit. Bank sering menerima sejumlah besar permintaan kredit. Petugas bank menawarkan kepada debitur syarat-syarat hemat waktu agar pengajuan kredit debitur dapat dipertimbangkan.

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran BNI KUR dalam mendukung UMKM? Bagaimana persyaratan umum kredit dan keunggulan dari BNI KUR? Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kredit usaha rakyat? Bagaimana gambaran realisasi pelaksanaan BNI KUR?

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder, yaitu menggunakan informasi dari dokumen dan orang-orang yang terkait dengan subjek penelitian yaitu kredit usaha rakyat dari Bank Negara Indonesia. Penelitian metode kualitatif menggabungkan kualitas dan hasil penelitian dengan kelengkapan data-data yang ada (Moleong, 2020). Dalam proses pengumpulan data, pertanyaan tentang siapa, di mana, kapan, dan bagaimana selalu menjadi perhatian. Penelitian kualitatif bergantung pada triangulasi data yang dihasilkan dari tiga pendekatan: wawancara, penilaian catatan organisasi, dan partisipasi.

Penelitian kualitatif ini menggunakan data-data sekunder, dimana peneliti menggunakan parameter dengan kumpulan data dan dokumen yang dapat diamati untuk menentukan frekuensi sifat atau karakteristik penelitian ini. Analisis dokumen dan literatur dilakukan dengan membaca, meringkas, atau telaah tulisan, serta mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam metode pengumpulan data. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, majalah, surat kabar, jurnal, dan makalah. Studi dokumen juga mencakup pengumpulan data dari dokumen perusahaan, seperti informasi tentang realisasi penyaluran kredit oleh perusahaan. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam mendeskripsikan situasi, kondisi, dan informasi yang dikumpulkan, kemudian peneliti juga menghubungkan teori-teori yang telah ada sebelumnya.

## **HASIL**

BNI KUR merupakan implementasi dari pemberian fasilitas kredit usaha rakyat yang dijalankan oleh Bank Negara Indonesia (BNI). BNI KUR bertujuan untuk memberikan modal usaha dan manfaat kepada masyarakat melalui Kredit Modal Kerja, berdasarkan informasi dan laporan terkait. BNI KUR sangat berperan untuk masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya dengan plafon kredit yang sangat memungkinkan masyarakat untuk

memanfaatkan sesuai dengan perencanaan dan pengembangan usaha yang dijalankannya Program BNI KUR (Kredit Usaha Rakyat) merupakan salah satu program BNI yang bertujuan untuk membantu pemilik usaha kecil menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan yang lebih mudah dengan bunga yang relatif rendah. Dengan BNI KUR, UMKM dapat mengakses pembiayaan yang lebih terjangkau dan kompetitif untuk mendukung kegiatan bisnis mereka, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja usahanya. Selain itu, BNI KUR juga memberikan akses pembiayaan kepada UMKM yang belum memenuhi persyaratan kredit konvensional.

Plafon kredit yang diberikan dalam program BNI KUR mencapai maksimal 500 juta rupiah dan dibuat untuk jangka waktu yang fleksibel hingga 5 tahun. Salah satu keunggulan dari KUR BNI untuk fasilitas kredit KUR BNI diberikan maksimal Rp 50 juta tanpa agunan tambahan. Jangka waktu pengembalian hingga 3 tahun untuk kredit modal kerja dan 5 tahun untuk kredit investasi. Bunga yang diberikan untuk Plafon BNI KUR adalah tergantung pada jenis usaha dan risiko KUR Debitur. Selain itu, BNI juga memberikan layanan asuransi terhadap KUR dengan premi yang dibayar oleh nasabah debitur yang dijamin oleh Penjaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) atau Perum Jamkrindo dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Melalui program BNI KUR, BNI turut membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia khususnya dalam mendukung perkembangan UMKM. Dalam hal ini, BNI KUR berperan sebagai mitra strategis bagi UMKM Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan bisnis.

Berikut merupakan persyaratan dan ketentuan pengajuan kredit mikro di BNI KUR ([eform.bni.co.id](http://eform.bni.co.id)), yaitu:

1. Kriteria dari pemohon individu/perorangan atau badan usaha. Usaha mikro, kecil dan menengah, anggota keluarga dari karyawan / karyawan yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Tenaga kerja Indonesia (TKI), TKI yang purna dari bekerja di luar negeri, dan Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja yang melakukan usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
2. Perizinan usaha individu/perorangan atau badan usaha perorangan. Minimal adanya surat izin usaha mikro dan kecil (IUMK) yang diterbitkan pemerintah daerah dan/atau surat keterangan usaha dari kelurahan setempat atau surat ijin lainnya. Untuk badan usaha diluar penjelasan diatas di atas mengacu pada ketentuan BNI.
3. Kualitas Kredit Bank (jika ada) disyaratkan lancar.
4. Pengalaman usaha minimal telah berjalan selama 6 (enam) bulan.
5. Usia pemohon (khusus untuk pemohon individu / perserorangan) minimal 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun tetapi sudah menikah.



6. Hubungan dengan bank saat ini tidak sedang menerima kredit produktif dari Perbankan dan/atau tidak sedang menerima kredit program dari Pemerintah (kecuali KUR).
7. NPWP tidak disyaratkan
8. Jaminan tidak diwajibkan jaminan tambahan.

Kemudian berikut ini merupakan tahapan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Negara Indonesia (BNI):

1. Persiapan sebelum mengajukan KUR di BNI termasuk memastikan bahwa debitur memenuhi persyaratan dan memiliki dokumen-dokumen yang diperlukan. Beberapa dokumen yang umumnya dibutuhkan meliputi identitas pemohon (KTP dan NPWP), dokumen usaha (SIUP, TDP, atau akta pendirian perusahaan), laporan keuangan perusahaan (neraca, laporan laba rugi), rencana usaha dan proyeksi keuangan, dokumen pendukung lainnya sesuai dengan jenis usaha.
2. Kunjungi cabang BNI terdekat dengan membawa semua dokumen yang diperlukan dan mintalah petunjuk kepada petugas mengenai pengajuan KUR.
3. Konsultasi dengan petugas, debitur konsultasikan rencana pengajuan KUR kepada petugas bank. BNI akan memberikan informasi lebih lanjut tentang persyaratan, proses pengajuan, dan kemungkinan tingkat suku bunga.
4. Formulir aplikasi KUR dari petugas bank diisi dengan lengkap serta akurat. Pastikan debitur mengisi semua informasi yang diminta dengan benar.
5. Melengkapi dokumen pendukung yang diminta oleh petugas bank dan lengkapi formulir aplikasi dengan dokumen tersebut. Pastikan dokumen yang debitur berikan sudah lengkap dan dalam kondisi yang baik.
6. Pengajuan KUR dilakukan setelah semua dokumen dan formulir aplikasi terisi dengan benar, serahkan kepada petugas bank untuk diajukan sebagai permohonan KUR. Petugas bank akan memeriksa dokumen-dokumen dan memproses pengajuan.
7. Bank akan melakukan analisis kredit untuk mengevaluasi kelayakan pengajuan KUR. Ini meliputi penilaian risiko, kapasitas pembayaran, dan kelayakan bisnis. Bank akan melihat laporan keuangan, rencana usaha, dan dokumen pendukung lainnya.
8. Keputusan dan pencairan dilakukan setelah proses penilaian selesai, debitur akan diberi tahu tentang keputusan pengajuan KUR nya. Jika disetujui, bank akan menginformasikan jumlah kredit yang disetujui, suku bunga, jangka waktu, dan persyaratan lainnya. Kemudian jika debitur menyetujui, bank akan melakukan pencairan dana sesuai dengan kesepakatan.

Persyaratan serta tahapan yang mudah dan juga detil bisa menjadi keunggulan dari BNI KUR, disarankan untuk menghubungi cabang BNI terdekat untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan terkini



mengenai proses pengajuan KUR di BNI. Untuk plafon penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Negara Indonesia (BNI) adalah jumlah maksimum pinjaman yang dapat diberikan kepada penerima KUR. Plafon ini ditentukan berdasarkan jenis usaha, sektor ekonomi, dan kebutuhan modal usaha. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang plafon penyaluran KUR BNI:

1. Plafon Umum: Mikro, maksimum Rp 25 juta per debitur. Kecil, maksimum Rp 500 juta per debitur.
2. Plafon Khusus: Mikro Plus, maksimum Rp 50 juta per debitur. Khusus untuk sektor pertanian, perikanan, dan kelautan. Pelaku Usaha Rintisan (PUI), maksimum Rp 500 juta per debitur. Khusus untuk UMKM yang berada di klaster strategis atau memiliki potensi pertumbuhan. UMKM Go Online, maksimum Rp 500 juta per debitur. Khusus untuk UMKM yang bergerak dalam bidang e-commerce atau perdagangan online. UMKM Sadar Digital, maksimum Rp 500 juta per debitur. Khusus untuk UMKM yang mengadopsi teknologi digital dalam operasional dan pemasaran.
3. Plafon KUR Kemitraan: KUR Kemitraan Mikro, maksimum Rp 50 juta per debitur. Khusus untuk usaha mikro yang bekerja sama dengan BUMN/BUMD/BUMDes. KUR Kemitraan Kecil, maksimum Rp 500 juta per debitur. Khusus untuk usaha kecil yang bekerja sama dengan BUMN/BUMD/BUMDes.
4. Plafon penyaluran KUR BNI dapat berubah tergantung pada kebijakan bank dan peraturan pemerintah. Evaluasi kelayakan kredit, kemampuan pembayaran debitur, dan sektor usaha yang dijalankan juga dapat memengaruhi jumlah plafon yang diberikan kepada penerima KUR. Untuk mendapatkan informasi terbaru tentang plafon penyaluran KUR BNI, disarankan untuk menghubungi cabang BNI terdekat.
5. Sebagai bank yang menyelenggarakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bank Negara Indonesia (BNI) mungkin menghadapi beberapa hambatan dalam melaksanakan program ini. Beberapa hambatan yang mungkin dihadapi BNI dalam melaksanakan BNI KUR antara lain:
6. Persyaratan dan dokumen yang rumit menurut calon debitur, proses pengajuan KUR melibatkan persyaratan dan dokumen yang harus dipenuhi oleh calon debitur. Bagi beberapa calon debitur, persyaratan dan prosedur ini mungkin rumit dan memerlukan pemahaman yang mendalam. Ini dapat menjadi hambatan bagi mereka yang tidak terbiasa dengan proses perbankan atau memiliki keterbatasan akses terhadap informasi dan bantuan.
7. Keterbatasan akses calon debitur ke Informasi, beberapa calon debitur KUR mungkin tidak memiliki akses mudah ke informasi terkait program KUR atau persyaratan yang diperlukan. Ini dapat menjadi hambatan dalam memahami proses, mengumpulkan dokumen yang diperlukan, atau mengetahui persyaratan terbaru yang berlaku.
8. Kapasitas yang terbatas, BNI mungkin menghadapi kendala kapasitas dalam menangani volume pengajuan KUR yang tinggi. Proses evaluasi





- kredit dan pencairan dana mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama karena terbatasnya sumber daya manusia dan infrastruktur yang tersedia.
9. Risiko kredit dan kolektibilitas seperti halnya dengan program pembiayaan lainnya, BNI juga berhadapan dengan risiko kredit dan tingkat kolektibilitas. Pemilihan debitur yang buruk atau ketidakmampuan debitur untuk membayar cicilan dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan KUR.
  10. Perubahan kebijakan pemerintah terkait program KUR, suku bunga, plafon pinjaman, atau persyaratan lainnya dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan ini dapat mempengaruhi pelaksanaan KUR dan mengharuskan BNI untuk menyesuaikan proses dan kebijakannya.
  11. Debitur KUR mungkin beberapa ada yang kurang memiliki kesadaran atau pemahaman yang cukup tentang manfaat dan proses KUR. Kurangnya pendidikan finansial atau akses ke literasi keuangan dapat menjadi hambatan dalam memahami dan juga memanfaatkan program KUR dengan baik.

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk menjalankan BNI KUR dengan realisasi pertumbuhan kinerja kredit usaha rakyat (KUR) yang progresif di tahun 2022. Hal ini sejalan dengan tren pemulihan ekonomi, sekaligus sebagai upaya dan langkah strategis BNI dalam mendorong kinerja mitra debitur UMKM. Baki kredit KUR BNI per April 2022 telah mencapai Rp 47,6 triliun dengan peningkatan 28,9%. BNI dipercaya oleh pemerintah untuk mendapat tambahan alokasi KUR hingga Rp 38 triliun per 2022. Nilai tersebut naik 22,7% dibandingkan 2021 senilai Rp 30,95 triliun. BNI KUR memiliki 3 strategi utama yang digunakan BNI untuk mendukung mendongkrak kinerja KUR. Pertama, BNI mendorong penyaluran KUR berbasis klaster yang salah satunya dengan fokus menggarap potensi sektor pertanian daerah. Kedua, BNI meningkatkan pembiayaan kepada mitra debitur korporasi melalui skema value chain dan kemudian menggunakan alat digitalisasi kredit dengan bekerja sama dengan mitra strategis untuk membantu optimalisasi big data UMKM. Akibatnya, penyaluran lebih cepat dan kualitas kredit lebih baik.

## **KESIMPULAN**

BNI KUR merupakan implementasi fasilitas kredit yang dijalankan oleh Bank Negara Indonesia (BNI) dengan tujuan untuk memberikan modal bagi usaha mikro dan kecil melalui kredit modal kerja dan kredit investasi. Berdasarkan informasi dan laporan terkait, BNI KUR berperan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha dengan plafon kredit yang sangat memungkinkan masyarakat tersebut memanfaatkannya sesuai dengan perencanaan dan pengembangan usaha yang dijalankan.

Persyaratan BNI KUR terdiri atas kriteria pemohon, perijinan usaha, kualitas kredit bank (jika ada), pengalaman usaha, usia pemohon, hubungan dengan bank, npwp dan jainan untuk plafon tertentu. Keunggulan BNI KUR adalah suku bunga yang kompetitif, plafon yang bervariasi, jangka waktu yang fleksibel, proses pengajuan yang jelas dan mudah, banyaknya pilihan KUR

husus, serta BNI merupakan Bank yang terpercaya dan salah satu bank terbesar di Indonesia dengan reputasi yang baik.

Hambatan umumnya dihadapi oleh KUR seperti adanya anggapan persyaratan dan dokumen yang rumit, keterbatasan akses calon debitur ke informasi, kapasitas SDM dan infrastruktur yang terbatas, risiko kredit dan kolektibilitas, perubahan kebijakan pemerintah, serta kurangnya literasi keuangan calon debitur.

Realisasi BNI KUR Berdasarkan data dari situs resmi BNI. Baki kredit KUR BNI per April 2022 telah mencapai Rp 47,6 triliun dengan peningkatan 28,9%. BNI dipercaya oleh pemerintah untuk mendapat tambahan alokasi KUR hingga Rp 38 triliun per 2022. Nilai tersebut naik 22,7% dibandingkan 2021 senilai Rp 30,95 triliun.

### **SARAN**

Beberapa saran dari peneliti sebaiknya pada debitur KUR digunakan pendekatan yang lebih komprehensif dalam komunikasi dan perjanjian kreditnya sehingga dapat lebih diketahui karakteristik peminjam KUR dan lebih memperhatikan pengaturan KUR yang efektif sesuai dengan jumlahnya. Kemudian BNI terus memberikan pelatihan, training dan pengembangan kompetensi karyawan sehingga pengelola KUR terus menambah keahlian di beberapa bidang penting untuk penyaluran KUR. Untuk meningkatkan pelayanan, diperlukan training dan peningkatan SDM sebagai bagian dari pelayanan prima pelaksanaan KUR. Kemudian penting bagi perbankan untuk terus berupaya mengatasi hambatan-hambatan dengan cara meningkatkan aksesibilitas informasi, menyederhanakan prosedur, meningkatkan kesadaran, dan menyediakan pendidikan finansial kepada calon debitur KUR.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abai, D. S. A., & Awang, M. D. (2021). Strategy of Business Capital Assistance to ASNAF Entrepreneurs: A Study in Maim, Melaka. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11(17).
- Antony, A., Peter, M., & Odhiambo, S. (2021). The Role of Banking Concentration on Financial Stability. *International Journal of Economics and Finance*, 13(6). <https://doi.org/10.5539/ijef.v13n6p103>
- Aristanto, E. (2019). Kredit Usaha Rakyat (KUR) : Pilihan Kebijakan Afirmatif Mendorong Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia. *Journal of Banking and Finance*, 1(1), 1–12.
- Aristanto, E., Khourouh, U., & Ratnaningsih, C. S. (2020). Dinamika Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia. *JURNAL MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN*, 8(1). <https://doi.org/10.26905/jmdk.v8i1.4247>
- Cahaya, A. D., Widyastuti, M. L., & Fatharani, H. (2021). Peran Perbankan dalam Pembiayaan UMKM di Tengah Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan (FIDUSIA)*, 4(2).
- Cahyani, A. P., & Iswanaji, C. (2021). Analisis Sistem Pengendalian Intern Pengajuan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Jateng Cabang Koordinator Magelang. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(1). <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.359>



- Chandrayanti, T. (2022). The Influence of Business Performance on Credit Accessibility to Micro and Small Enterprises (MSEs). *Ilomata International Journal of Management*, 3(1). <https://doi.org/10.52728/ijjm.v3i1.392>
- Dharmajaya, A. (2018). URGENSI PERAN DAN FUNGSI PERBANKAN DALAM MENINGKATKAN USAHA, MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI INDONESIA. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 10(1). <https://doi.org/10.28932/di.v10i1.1059>
- Eform.bni.co.id. SYARAT UMUM PEMOHON PERORANGAN KUR MIKRO BNI. Diakses pada 15 Mei 2023, dari [https://eform.bni.co.id/BNI\\_eForm/disclaimerPenawaran](https://eform.bni.co.id/BNI_eForm/disclaimerPenawaran)
- Engwa, F. E., Yakum, I. M., & Mukah, S. T. (2021). The Role of Banking Institutional Services on the Sustainable growth of SMEs in Cameroon. *Journal of Economics and Management Sciences*, 4(2). <https://doi.org/10.30560/jems.v4n2p1>
- Hutauruk, D. M. (2020). Peran perbankan sangat besar dalam menggerakkan ekonomi nasional. *Keuangan.Kontan.Co.Id*.
- Jamid, Z., Mardiana, R., & Sabir, S. (2022). Analysis of Factors that Influence Customer Loyalty in Taking People's Business Credit (KUR) at PT. Bank Sulselbar Makassar Main Branch. *Economics and Digital Business Review*, 3(1). <https://doi.org/10.37531/ecotal.v3i1.112>
- Lestari, N. L. P. R. W., & JUNIARIANI, N. M. R. (2022). The Role of Public Business Credit Financing By Financial Institutions On The Development Of MSME. *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science*, 2(1). <https://doi.org/10.38142/ijesss.v2i1.50>
- Malelak, D., Kellen, P. B., & Rozari, P. De. (2020). EFEKTIVITAS KREDIT USAHA RAKYAT DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH. *Jurnal EBI*, 2(1). <https://doi.org/10.52061/ebi.v2i1.12>
- Martokoesoemo, D. R. S., Sinaga, B. M., Kusnadi, N., & Syaikat, Y. (2020). Business Vulnerability and Credit Access for Agriculture-Based Micro and Small Women Entrepreneurs. *Economics and Finance in Indonesia*, 66(2). <https://doi.org/10.47291/efi.v66i2.666>
- Moleong, J. L. (2020). metodologi penelitian kualitatif J lexy Moleong. *Jurnal Ilmiah*.
- Murwadji, T., Tresna, T., Asmara, P., & Kusuma, S. (2020). People's Business Credit: Omnibus Law and Business Reengineering Community Financial Institutions. *Transnational Business Law Journal*, 1(1).
- Nam Hee, J., Hendrayaty, H., & Mulyadi, H. (2020). Analysis of Entrepreneurship Behavior and Business Capital Against Business Success. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i6.6653>
- Nam, Y., Sherraden, M. S., Huang, J., Lee, E. J., & Keovisai, M. (2019). Financial Capability and Economic Security among Low-Income Older Asian Immigrants: Lessons from Qualitative Interviews. *Social Work (United States)*, 64(3). <https://doi.org/10.1093/sw/swz015>
- Ponsam, J. G., Bella Gracia, S. V. J., Geetha, G., Karpaselvi, S., & Nimala, K. (2021). Credit Risk Analysis using LightGBM and a comparative study

- of popular algorithms. Proceedings of the 2021 4th International Conference on Computing and Communications Technologies, ICCCT 2021. <https://doi.org/10.1109/ICCCT53315.2021.9711896>
- Ramadayanti, W., & Kosasih, K. (2021). The Influence of Financial Performance on People's Business Credit in Banking Companies for the Period 2010-2019. *Aptisi Transactions on Management (ATM)*, 5(1). <https://doi.org/10.33050/atm.v5i1.1435>
- Ramaswamy, S., Khande, R., Patil, Y. S., & Kalkar, P. (2021). ADAPTING DIGITAL BANKING SERVICES DURING COVID-19 PANDEMIC: A STUDY ON CUSTOMER EXPERIENCES IN SELECTED DISTRICT OF MAHARASHTRA STATE, INDIA. *INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY*, 12(5). <https://doi.org/10.34218/ijeet.12.5.2021.002>
- Rastogi, S., Bhuvana, M., Vasantha, S., Soumaré, I., Tchana Tchana, F., Kengne, T. M., Okello, G., Bongomin, C., Munene, J. C., Ntayi, J. M., Malinga, C. A., Raichoudhury, A., Alfred, S., Maureen, T., Were, M., Nur, M., Siddik, A., Sun, G., Yanjuan, C., ... Fund, I. M. (2020). Does online banking technology at low-income credit unions promote financial inclusion? *Research in International Business and Finance*, 6(1).
- Saadat, S., Rawtani, D., & Hussain, C. M. (2020). Environmental perspective of COVID-19. In *Science of the Total Environment* (Vol. 728). <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138870>
- Suginam, S., Rahayu, S., & Purba, E. (2021). Efektivitas Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) Untuk Pengembangan UMKM. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(1). <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i1.1024>
- Suparwo, A., Suhendi, H., Roisah, R., Arifin, T., & Shobary, M. N. (2018). Strategi Pengembangan Usaha Pada UMKM Baju Bayi Indra Collection. *Jurnal Abdimas BSI*, Vol.1 No.2(E-ISSN: 2614-6711).
- Utama, A. N. B., & Mustika, C. (2022). ANALISIS HUBUNGAN INDEKS HARGA SAHAM KOMPOSIT DAN TINGKAT INFLASI DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID 19 DENGAN PENDEKATAN KAUSALITAS GRANGER. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 11(03). <https://doi.org/10.22437/jmk.v11i03.20396>
- Vincent, G., & Sivakumar, S. (2019). Financial inclusion in India—A progress and challenges. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28(19).
- Widayanti, W., Eko Riadi, Alexandro, R., Dehen Erang, & Putri, W. U. (2022). Analisis Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pada BRI Palangka Raya Unit Yos Sudarso. *Edunomics Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.37304/ej.v3i1.4000>
- Wilandari, D. F. (2020). PENGARUH MODAL KERJA DAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PELAKU UMKM. *Jurnal Proaksi*, 7(1). <https://doi.org/10.32534/jpk.v7i1.1027>